Strategi Perencanaan Industri, Perdagangan dan Pembangunan Daerah Berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara

Kartini Madjid

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia

e-mail: notaris.kartinimadjid@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji strategi perencanaan industri, perdagangan, dan pembangunan daerah berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar, Maluku Utara masih menghadapi tantangan dalam hal ketimpangan pembangunan antar wilayah. Penelitian ini menggunakan landasan teori pertumbuhan ekonomi wilayah, teori basis ekonomi, dan konsep pembangunan daerah untuk menganalisis situasi dan merumuskan strategi. Hasil analisis menunjukkan perlunya strategi komprehensif yang mengintegrasikan aspek industri, perdagangan, dan pembangunan berkelanjutan. Strategi ini meliputi pengembangan industri pengolahan bernilai tambah tinggi, peningkatan akses pasar produk lokal, dan pembangunan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan selektif, reduktif, dan konsentratif direkomendasikan dalam perencanaan wilayah lokal untuk pembangunan desa terpadu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan strategi perencanaan yang tepat dan komitmen dari semua pihak, Maluku Utara dapat mewujudkan pembangunan industri, perdagangan, dan daerah yang berkelanjutan, yang akan membawa manfaat bagi masyarakat setempat dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial nasional.

Kata kunci: *Perencanaan Industri, Perdagangan dan Pembangunan Daerah Berkelanjutan, Provinsi Maluku Utara*

Abstract

Cultural tourism is a type of tourism activity that utilizes culture as its main attraction. The economic development of cultural tourism requires synergy among the government, communities, and business stakeholders. This study aims to explore the extent to which local cultural tourism can enhance the economy in the province of Yogyakarta. Using a descriptive-exploratory method with a case study approach, the research combines direct observation and literature review. Findings reveal that Yogyakarta offers various unique cultural attractions such as temples, palaces, handicrafts, traditional performing arts, and cultural diversity. These cultural attractions not only serve as tourist magnets but also significantly contribute to the local economy by creating business opportunities and jobs. Yogyakarta has set a vision to become a world-class tourist destination under the motto "Jogja Cultural Experiences," emphasizing culture as its primary tourism character. Support from the local government in terms of infrastructure improvement and cultural preservation is crucial to achieve this vision. Additionally, community awareness and participation in preserving and developing cultural tourism are also essential. The study concludes that the economic development of cultural tourism in Yogyakarta requires collaboration among the government, communities, and business stakeholders. With appropriate strategies and strong commitment, Yogyakarta can maximize its tourism potential and make a greater contribution to both local and national economies.

Keywords : *Culture, Tourism Economy, Development*

PENDAHULUAN

Pemaknaan atas modernisasi memang seringkali menimbulkan istilah rancu dan tumpang tindih sehingga sulit sekali membedakan antara makna modern dalam pengertian sebagai suatu pemahaman atas rasionalisasi dalam bertindak dan berperilaku dengan westernisasi. Meskipun demikian, masyarakat barat sebagai pencetus awal modernisasi sesungguhnya telah melalui berbagai proses dalam berbagai aspeknya guna mewujudkan suatu sistem organisasi sosial politik tentu merupakan awal dari bagaimana evolusi sistem pemerintahan dalam kerangka rasional dan terukur. Kondisi ini pula yang kemudian terjadi pada berbagai perubahan sistem pemerintahan di Maluku Utara. Perubahan tersebut menyebabkan adanya kemunculan hal baru sistem tata pemerintahan sebagai suatu organisasi sosial di dalam masyarakat Maluku Utara. (Junaib Umar, 2013:11)

Perkembangan pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku Utara tergolong relatif tertinggal dengan daerah lain di Indonesia. Salah satu penyebab utama dari ketertinggalan tersebut diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang selalu bertumpu pada dimensi sektoral. Ini tampak jelas dengan dominannya penerapan asas dekosentrasi dan orientasi sektoral pemerintah pusat. Penerapan di daerah pun nampaknya tidak jauh berbeda, terlihat dari kuatnya fanatisme dinas dan pendekatan sektoral dalam RPJMD. Hal ini tercermin dari dokumen-dokumen perencanaan yang tidak mempunyai perincian program dan aksi hingga kecamatan, apalagi kelurahan (Kuncoro, 2004)

Dalam konteks ini, ketertinggalan pembangunan jelas akan menimbulkan permasalahan dan dampak yang lebih besar terhadap pengentasan jumlah kemiskinan, pengangguran, penyediaan lapangan kerja, serta dapat menghambat upaya pengurangan tingkat ketimpangan pendapatan secara regional dalam suatu daerah. Karena itu, perlu dilakukan suatu strategi percepatan pembangunan bagi daerah-daerah tertinggal.

Di balik keindahan alamnya yang memukau, Maluku Utara menyimpan realitas kompleks, yakni kesenjangan pembangunan antar wilayah. Beberapa daerah di Maluku Utara masih tertinggal dalam berbagai indikator pembangunan, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kesenjangan ini menghambat laju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan. Menyadari hal ini, diperlukan strategi khusus untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah tertinggal di Maluku Utara. Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku Utara yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,278 turun sebesar 0,022 poin dari kondisi Maret 2021 yang sebesar 0,300. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di Provinsi Maluku Utara semakin rendah. (<https://malut.bps.go.id/> , 2022)

Dari data tersebut, pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antardaerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Maluku Utara, Gini Ratio di Provinsi Maluku Utara merupakan yang terendah ke-2 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Berbagai permasalahan tersebut akan menjadi ancaman jika tidak segera di selesaikan dengan cepat. Suatu hal yang sangat ironis, mengingat potensi sumberdaya alam yang terkandung di daerah ini sangat besar untuk diolah menjadi sumber pendapatan dan penerimaan daerah dan selanjutnya dapat digunakan dalam kegiatan pembangunan yang berorientasi pada terwujudnya pembangunan yang pro growth, pro poor dan pro equity. Hal tersebut dapat dicapai jika strategi pembangunan di implementasikan dengan baik tanpa meninggalkan prinsip-prinsip pembangunan secara global (millenium goal development) yang tertuang dalam dasar dan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan.

Provinsi dengan ketimpangan terendah yaitu Provinsi Bangka Belitung, sedangkan Provinsi dengan ketimpangan tertinggi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 sebesar 0,295 turun 0,003 poin dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,298. Sementara Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2021 sebesar 0,256 turun 0,009 poin dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang

sebesar 0,265. Pada periode Maret-September 2021, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami sedikit penurunan dari 0,970 pada Maret 2021 menjadi 0,943 pada September 2021. Indeks keparahan kemiskinan (P2) juga menurun dari 0,207 pada Maret 2021 menjadi 0,200 pada September 2021. Distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di Provinsi Maluku Utara pada Maret 2021 yaitu sebesar 22,87 persen dan termasuk pada kategori ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 21,13 persen sedangkan di daerah perdesaan sebesar 24,02 persen. (<https://malut.bps.go.id>, 2022)

Dari uraian di atas, output yang diharapkan salah satunya adalah konsep jangka panjang berupa strategi arah kebijakan pembangunan industri dan perdagangan di Maluku Utara yang berkelanjutan. Atas dasar itu maka proposal penelitian ini adalah “Strategi Perencanaan Industri, Perdagangan dan Pembangunan Daerah Berkelanjutan di propinsi Maluku Utara”

Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Menurut Rustiadi (2011), pertumbuhan ekonomi wilayah dapat berlangsung jika terjadi hubungan yang saling memperkuat-bukan saling eksploitasi- antara wilayah central dan hinterlandnya. Sehingga akan terbangun keterkaitan yang sinergi, baik backward and forward linkages.

Teori Basis Ekonomi

Menurut Glasson (1990) kegiatan- kegiatan basis (basic activities) adalah kegiatan mengeksport barang-barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis (nonbasic activities) adalah kegiatan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal didalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengeksport barang jadi; luas lingkup produksi dan daerah pasar yang terutama bersifat lokal. Implisit didalam pembagian kegiatan- kegiatan ini terdapat hubungan sebab akibat yang membentuk teori basis ekonomi.

Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa dan akan menurunkan volume kegiatan (Richardson, 1977).

Pembangunan Daerah

Adanya perbedaan-perbedaan di antara sifat-sifat dari perekonomian daerah dengan perekonomian nasional dan di antara kekuasaan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembangunan akan menimbulkan pengaruh yang berbeda pula terhadap corak strategi program pembangunan daerah. Tujuan pembangunan, termasuk pembangunan daerah, merupakan suatu kehendak masyarakat untuk mencapai suatu keadaan tertentu atau menghindari terjadinya keadaan tertentu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu faktor yang mempengaruhi corak pembangunan daerah dan sumber-sumber daya yang tersedia yang merupakan faktor-faktor yang benar-benar timbul di dalam masyarakat, faktor ini merupakan keadaan yang ingin diciptakan oleh masyarakat pada masa yang akan datang (Sukirno, 1976).

Dengan merumuskan tujuan-tujuan pembangunan, atau dalam bentuk yang lebih terperinci adalah menentukan target yang ingin dicapai dalam pembangunan, sesuatu masyarakat telah lebih menegaskan lagi bentuk keadaan sosial dan ekonomi yang ingin diciptakannya pada beberapa tahun mendatang. Dengan mengumpulkan fakta-fakta mengenai masalah-masalah pembangunan daerah yang ada (wujud) di dalam masyarakat, sebenarnya masyarakat tersebut telah dapat merumuskan langkah-langkah yang harus dibuat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pembangunan Daerah merupakan semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk maupun tidak termasuk urusan rumah tangga daerah yang meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari Pemerintah (APBD dan APBN) dan bersumber dari masyarakat.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif tentang strategi perencanaan industri, perdagangan, dan pembangunan daerah berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Maluku Utara, dengan fokus pada area-area yang relevan dengan pengembangan industri, perdagangan, dan pembangunan daerah.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer: diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait (pejabat pemerintah daerah, pelaku industri, pedagang, dan tokoh masyarakat).
- b. Data sekunder: diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan statistik, publikasi ilmiah, dan sumber-sumber terpercaya lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode:

- a. Studi literatur: mengkaji dokumen-dokumen relevan terkait perencanaan pembangunan daerah, industri, dan perdagangan di Maluku Utara.
- b. Wawancara mendalam: melakukan wawancara dengan informan kunci untuk mendapatkan informasi mendalam tentang strategi dan tantangan pembangunan.
- c. Observasi: melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi dan potensi daerah di Maluku Utara.

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Langkah-langkah analisis meliputi:

- a. Reduksi data: memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian.
- b. Penyajian data: menyusun informasi secara sistematis untuk memudahkan penarikan kesimpulan.
- c. Penarikan kesimpulan: menginterpretasikan data dan merumuskan strategi perencanaan berdasarkan temuan penelitian.

Validasi Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data.

Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang strategi perencanaan industri, perdagangan, dan pembangunan daerah berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara, serta menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan relevan dengan konteks lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Maluku Utara memiliki potensi besar untuk pengembangan industri, perdagangan, dan pembangunan daerah berkelanjutan. Kekayaan sumber daya alam, budaya maritim yang kuat, dan letak geografis yang strategis menjadi modal utama untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan di wilayah ini. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi perencanaan yang matang dan komprehensif yang mengintegrasikan aspek industri, perdagangan, dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah, maka beberapa kondisi harus diperhatikan, seperti kekuatan kekayaan sumber daya alam (perikanan, pertambangan, hutan, dan potensi energi terbarukan), budaya maritim yang kuat, letak geografis yang strategis di jalur perdagangan internasional, potensi wisata bahari yang luar biasa dan dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan daerah. Selain kekuatan kelemahan juga harus menjadi perhatian yang harus dilakukan untuk mengatisipasinya, seperti infrastruktur dasar yang masih terbatas, keterampilan sumber daya manusia yang belum memadai, ketergantungan pada sektor primer (perikanan dan pertambangan), persoalan konektivitas antar wilayah dan ampak pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam,

Jika dilihat dari teori basis ekonomi, bahwa kegiatan ekspor adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah karena kegiatan basis. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi dari permintaan yang bersifat exogenous (tidak tergantung pada kekuatan intern/permintaan lokal) maka semua kegiatan lain yang bukan kegiatan basis termasuk ke dalam kegiatan/sektor service atau pelayanan, tetapi untuk tidak menciptakan pengertian yang keliru tentang arti service disebut saja sektor nonbasis. Sektor nonbasis (service) adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal. Karena sifatnya yang memenuhi kebutuhan lokal, permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat.

Bahwa pengembangan Industri, harus berfokus pada pengembangan industri pengolahan hasil laut yang bernilai tambah tinggi dan mendorong investasi di sektor industri kreatif dan pariwisata dengan membangun infrastruktur industri yang memadai. Dalam konteks penelitian ini maka jika dikaitkan dengan perdagangan, maka harus dapat meningkatkan akses pasar bagi produk-produk lokal. Dengan mengembangkan kerjasama perdagangan dengan daerah lain dan luar negeri, maka di perlukan platform e-commerce untuk memasarkan produk lokal.

Dari uraian di atas jika dikaitkan dengan pembangunan daerah, maka Pembangunan Daerah Berkelanjutan di Maluku Utara harus mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan melestarikan sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan, mengembangkan energi terbarukan dan efisiensi energi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan memperkuat penegakan hukum dan regulasi terkait pembangunan berkelanjutan.

Dengan strategi perencanaan yang tepat dan komitmen kuat dari semua pihak, Provinsi Maluku Utara dapat mencapai pembangunan industri, perdagangan, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Strategi ini perlu diimplementasikan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Pembangunan yang berkelanjutan di Maluku Utara akan membawa manfaat bagi masyarakat di wilayah ini, serta berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial nasional.

Pembangunan membutuhkan perencanaan yang baik. Perencanaan yang terarah dan sistematis di perlukan agar tujuan dari kegiatan pembangunan itu dapat tercapai. Untuk itu diperlukan road map pembangunan yang disesuaikan dengan keinginan dan visi misi pembangunan daerah tersebut. Potensi dan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki oleh Propinsi Maluku Utara, adalah dasar dalam menentukan kemana dan apa yang ingin dicapai baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kebijakan pembangunan selayaknya harus fokus dan sesuai dengan dasar pembangunan dan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional yang telah di tetapkan pemerintah.

Sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia Propinsi Maluku Utara sangat concern dan menaruh perhatian yang besar dalam mencapai target-target pembangunan yang telah di pogramkan. Salah satunya adalah pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan. Dengan luas wilayah yang sebagian besar adalah pulau-pulau kecil dan kepulauan, Maluku Utara mengandung kekayaan sumberdaya alam yang luar biasa besarnya terutama di sektor perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan dan pertambangan.

Pengalaman menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi butuh sinergi dari berbagai sektor, terutama sektor swasta baik dalam bentuk penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Pada periode tahun 1981-1996 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 7 (tujuh) persen per tahun. Untuk Maluku Utara sepuluh tahun terakhir (2007 -2016) pertumbuhan ekonomi rata-rata tumbuh sebesar 6,1 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertanian, disusul sektor jasa, hotel dan restoran serta sektor industri dan pertambangan. Ketiga sektor ini masih mendominasi kontribusinya pada PDRB Provinsi Maluku Utara.

Pembangunan ekonomi pedesaan secara umum memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam hal pemerataan hasil pembangunan dan pendapatan penduduk, pengentasan kemiskinan, pencapaian ketahanan pangan baik di tingkat lokal maupun di tingkat rumahtangga dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Untuk perencanaan wilayah terutama wilayah lokal dengan luas yang relatif kecil dalam rangka pembangunan desa haruslah dipahami benar-benar bahwa masalah yang dihadapi begitu kompleks dan luas.

Sehubungan dengan itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- 1) Terdapat tiga sistem utama terbuka yang harus diperhatikan yakni:
 - a) Sistem tata ruang termasuk lokasi perusahaan produksi, permukiman, prasarana fisik dan pola tata guna tanah.
 - b) Sistem ekonomi yaitu termasuk pola produksi, investasi, arus produksi dan barang, harga, tataniaga dan kelembagaannya.
 - c) Sistem sosial yaitu termasuk pelayanan sosial, kesempatan kerja, keamanan dan ketentraman, organisasi sosial dan lembaga-lembaga pembangunan.
- 2) Perencanaan lokal perlu dihubungkan dan dikoordinasikan dengan rencanarencana regional dan nasional dalam berbagai sektor.
- 3) Adanya kebutuhan untuk menyusun suatu rencana antar sektoral dan antar proyek dan menciptakan hubungan antar system diantara kegiatan-kegiatan tersebut di tingkat lokal.
- 4) Dinamika hubungan antara perencanaan dan pelaksanaan harus tetap dijaga melalui sistem monitoring dan evaluasi.

Perencanaan wilayah lokal untuk pembangunan desa terpadu, mempunyai konsep, prinsip dan strategi tersendiri tergantung pada situasi dan kondisi negara yang bersangkutan. Dalam pembangunan wilayah Maluku Utara, terdapat pendekatan secara umum berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Selektif yang bermakna prioritas dalam kegiatan pembangunan; (2) Reduktif yang bermakna menyederhanakan hal-hal yang kompleks terutama di bidang teknologi. (3) Konsentratif yang bermakna mengkonsentrasi secara mendalam terhadap aspek selektif dari pembangunan. Sehingga bisa dijelaskan bahwa pembangunan desa terpadu di Provinsi Maluku Utara membutuhkan perencanaan wilayah lokal yang matang dan komprehensif. Perencanaan ini harus mempertimbangkan kondisi dan potensi desa, serta kebutuhan masyarakatnya, dengan pendekatan selektif, reduktif, dan konsentratif dapat menjadi landasan untuk menyusun perencanaan wilayah lokal yang efektif dan efisien.

Secara lebih jelas dapat dijelaskan bahwa:

1. Prinsip Selektif
 - a. Memfokuskan pada prioritas: Memilih aspek-aspek yang paling penting dan mendesak untuk dikembangkan di desa.
 - b. Melihat potensi desa: Mengidentifikasi potensi yang dimiliki desa dan menitikberatkan pada pengembangan potensi tersebut.
 - c. Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan memastikan bahwa perencanaan tersebut selaras dengan kebutuhan mereka.
2. Prinsip Reduktif
 - a. Menyederhanakan kompleksitas: Menyederhanakan perencanaan agar mudah dipahami dan diimplementasikan.
 - b. Memfokuskan pada inti: Menghilangkan hal-hal yang tidak penting dan hanya fokus pada aspek-aspek yang krusial.
 - c. Meningkatkan efisiensi: Memastikan bahwa perencanaan tersebut dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif.
3. Prinsip Konsentratif:
 - a. Memfokuskan sumber daya: Memusatkan sumber daya pada program-program prioritas yang telah dipilih.
 - b. Meningkatkan dampak: Memastikan bahwa program-program yang diimplementasikan memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa.
 - c. Meningkatkan akuntabilitas: Mempermudah pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pembangunan desa.

Menjelaskan prinsip tersebut dalam konteks penerapan pada pembangunan lokal di Propinsi Maluku Utara, dapatlah dilihat:

1. Identifikasi Desa Sasaran: Memilih desa-desa yang menjadi prioritas untuk pembangunan terpadu berdasarkan kriteria yang jelas, seperti tingkat kemiskinan, akses infrastruktur, dan potensi sumber daya.
2. Analisis SWOT: Melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk setiap desa sasaran untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi desa.
3. Penyusunan Perencanaan: Menyusun perencanaan pembangunan desa terpadu yang komprehensif dan terukur, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip selektif, reduktif, dan konsentratif.
4. Implementasi dan Monitoring: Mengimplementasikan perencanaan dengan melibatkan semua pihak terkait, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program.

Pendekatan selektif, reduktif, dan konsentratif dapat menjadi panduan yang efektif untuk menyusun perencanaan wilayah lokal untuk pembangunan desa terpadu di Provinsi Maluku Utara. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perencanaan tersebut dapat menjadi lebih terarah, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat desa.

SIMPULAN

Dari uraian di atas, merajut masa depan berkelanjutan Maluku Utara melalui Industri, Perdagangan, dan Pembangunan Daerah yang terencana, dimana Provinsi Maluku Utara, dengan kekayaan sumber daya alam, budaya maritim yang kuat, dan letak geografis yang strategis, memiliki potensi besar untuk mencapai pembangunan industri, perdagangan, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Namun, untuk mewujudkan cita-cita ini, diperlukan strategi perencanaan yang matang dan komprehensif yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut. Sehingga diperlukan strategi perencanaan yakni:

1. Pengembangan Industri:
 - a. Fokus pada pengembangan industri pengolahan hasil laut yang bernilai tambah tinggi.
 - b. Mendorong investasi di sektor industri kreatif dan pariwisata.

- c. Membangun infrastruktur industri yang memadai.
 - d. Meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di bidang industri.
 - e. Memperkuat riset dan pengembangan teknologi industri.
2. Perdagangan:
- a. Meningkatkan akses pasar bagi produk-produk lokal.
 - b. Mengembangkan kerjasama perdagangan dengan daerah lain dan luar negeri.
 - c. Memanfaatkan platform e-commerce untuk memasarkan produk lokal.
 - d. Meningkatkan daya saing produk lokal melalui inovasi dan branding.
 - e. Membangun infrastruktur perdagangan yang memadai.
3. Pembangunan Daerah Berkelanjutan:
- a. Mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan.
 - b. Melestarikan sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan.
 - c. Mengembangkan energi terbarukan dan efisiensi energi.
 - d. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
 - e. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 - f. Memperkuat penegakan hukum dan regulasi terkait pembangunan berkelanjutan.

Dengan strategi perencanaan yang tepat, komitmen yang kuat, dan kolaborasi dari semua pihak, Maluku Utara dapat mewujudkan pembangunan industri, perdagangan, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pembangunan ini akan membawa manfaat bagi masyarakat di wilayah ini, serta berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial nasional

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, K. T., Fauzi, A., & Juanda, B. (2021). Strategi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 9(1), 43-59.
- Asngari, I. (2018). Pengaruh Perkembangan Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1), 1-10.
- Azis, I. J. (2020). Regional Development in Indonesia: Some Notes for the Evaluation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(1), 1-31.
- Bappenas. (2019). Pembangunan Daerah dalam Angka 2019. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 3(1), 1-15.
- BPS.go.id. (2022, Januari 17). Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Maluku Utara Berdasarkan Gini Ratio yaitu 0,278. <https://malut.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/628/tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-maluku-utara-berdasarkan-gini-ratio-yaitu-0-278.html>. 17 Januari 2022.
- Firdaus, M., & Witomo, C. M. (2021). Analisis Sektor Unggulan dan Pola Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 16(1), 39-50.
- Glasson, John. (1990). Pengenalan Perancangan Wilayah, Konsep dan Amalan (Alih Bahasa Ahris Yakup). Malaysia, Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kualalumpur.
- Haryanto, J. T. (2018). Kebijakan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia: Tinjauan Kritis dan Arah ke Depan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 26(1), 1-15.
- Hidayat, R., & Patunru, A. A. (2020). The Effect of Export-Oriented Industrialization on Employment in Indonesia's Manufacturing Sector. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 285-308.
- Ismail, M., & Santoso, D. B. (2019). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) dan Penganggaran di Indonesia. *Jurnal Ecosystem*, 19(1), 732-753.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi Perencanaan Strategi dan Peluang). Jakarta: Penerbit Airlangga
- Mahi, B. R. (2016). Indonesian Decentralization: Evaluation, Recent Movement and Future Perspectives. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 31(1), 119-133.

- Mardiana, R., Firdaus, M., & Tambunan, M. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 171-185.
- Michael, Todaro P. (2000). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I*. Jakarta Penerbit : Erlangga.
- Mukhlis, I., Sugeng, H., & Utomo, S. H. (2018). The Role of Tourism Sector to Regional Economic Development: A Dynamic Panel Data Approach. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 19(2), 157-170.
- Nugroho, S. B. M. (2018). Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Pengurangan Risiko Bencana. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 29(1), 1-14.
- Resosudarmo, B. P., & Vidyattama, Y. (2016). Regional Income Disparity in Indonesia: A Panel Data Analysis. *ASEAN Economic Bulletin*, 23(1), 31-44.
- Richardson Harry.,W. (1977). *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. (terjemahan: Paul Sitohang). Jakarta: LPFE-UI.
- Rustiadi, E, Saefulhakim, S, Panuju DR. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta (ID): Cresspent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Sukirno, Sadono.(1976). *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES UI.
- Syafri, M., & Rahim, S. (2020). Analisis Pengembangan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Planoeearth*, 5(1), 29-35.
- Umar, Junaib. (2013). *Maluku Utara Dalam Relasi Historis*. *Jurnal Pusaka Nomor 1 Vol.1. Media Kajian dan Pemikiran Islam*. Malang Jatim: LP3M Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam.
- Zulham, T., & Seftarita, C. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 82-91.